



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BANDAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SUB BID PENANGANAN KONFLIK

Nomor SOP	/SOP.Bakesbangpol/01.2024
Tanggal	Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	
	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
	BERI FAKHRIZAL, ST NIP. 19730827 200312 004

SOP PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH TIM TERPADU PENGANAN KONFLIK SOSIAL

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksanaan
1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Membidangi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Kesatuan dan Politik 7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas No. 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Nadan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan rencana aksi daerah 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan koordinasi penanganan konflik sosial
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Penyusunan Data	Komputer/Lap Top dan Peralatan Penukung Lainnya Dokumen RPJMD Kab. Kepulauan Anambas
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika penyusunan RAD tidak sesuai dengan SOP maka pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial tidak akan berjalan maksimal	Disimpan sebagai data elektronik dan manual dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah dan penanganan konflik sosial

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Bupati	Kepala Badan	Kabid	Anggota Tim Terpadu	Kasubbid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengacu kedalam permendagri no. 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial		mula					Buku	60 Menit	Instruksi
2.	Kepala Badan mendisposisi kepada Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik							Buku	25 Menit	Konsep
3.	Kabid memerintahkan ke Kasubbid Penangan Konflik selaku koordinator secretariat untuk dipedomani							Buku	60 Menit	Instruksi
4.	Kasubbid Penangan Konflik mengonsep surat Permintaan Data ke instansi Terkait sesuai dengan Rencana Aksi Terpadu dalam RA Kementerian Dalam Negeri							Konsep Surat	30 Menit	Draf
5.	Staf sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial mengetik draf surat permintaan data kegiatan instansi sesuai dengan RA yang dikonsep oleh Kasubbid Penangan Konflik							Laptop	20 Menit	Surat Permintaan Data
6.	Staf sekretariat memberikan surat yang sudah di ketik kepada Kasubbid Penangan Konflik untuk dikoreksi dan untuk diparaf							Draft	10 Menit	Paraf
7.	Kasubbid penanganan konflik sosial memberikan surat yang sudah di paraf kepada Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik untuk diparaf							Draft	2 Menit	Paraf
8.	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik memerlukan draf surat permintaan data untuk ditandatangani oleh Kepala Badan							Kertas	2 Menit	Draft Surat
9.	Kepala Badan menandatangani Surat Permintaan Data untuk dikirim kepada Instansi Terkait selaku Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial							Draft Surat	5 Menit	Surat Permintaan Data
10.	Staf sekretariat menggandakan surat yang akan dikirim ke instansi terkait selaku anggota Tim Terpadu							Kertas	10 Menit	Penggandaan
11.	Staf Sekretariat mengirimkan surat permintaan data kepada instansi terkait selaku keanggotaan tim terpadu penanganan konflik untuk menyampaikan laporan rencana aksi terpadu							Pengiriman surat	60 Menit	Pemintaan Data
12.	Instansi terkait selaku keanggotaan tim terpadu menerima surat permintaan data terkait untuk mengirimkan data laporan kegiatan rencana aksi kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku sekretaris dalam keanggotaan Tim Terpadu							Surat Permintaan Data	120 Menit	Surat Diterima

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Bupati	Kepala Badan	Kabid	Anggota Tim Terpadu	Kasubbid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
13.	Instansi terkait selaku keanggotaan tim terpadu penanganan konflik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Kep. Anambas mengirimkan laporan kegiatan rencana aksi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku sekretariat dalam rangka penampung dan penyusunan rencana aksi daerah							Data Laporan	20 Menit	Dokumen	
12.	Staf sekretariat menerima data laporan kegiatan dan memberikannya kepada Kasubbid penanganan konflik selaku koordinator untuk dapat menyusun rencana aksi daerah tim terpadu penanganan konflik							Dokumen	10 Menit	Data Laporan	
13.	Kasubbid penanganan konflik menerima laporan data kegiatan rencana aksi dan mengumpulkan data tersebut untuk dapat dipedomani sebagai langkah dalam menyusun rencana aksi							Data Laporan	60 Menit	Draft RAD	
14.	Kasubbid penanganan konflik memasukkan data rencana aksi masing-masing instansi terkait kedalam draft RAD tim terpadu							Laptop	80 Menit	Data Laporan	
15.	Kasubbid penanganan konflik menganalisis dan menyusun sekaligus mengetik dan mengeprint RAD Tim Terpadu							Laptop	120 Menit	Draft Dokumen Laporan RAD	
16.	Kasubbid Penanganan konflik memberikan draft RAD kepada Kabid Kewaspadaan Nasional untuk dapat dipelajari dan dikoreksi lebih lanjut							Dokumen	15 Menit	Koreksi	
17.	Kabid Kewaspadaan Nasional memeriksa draf RAD sebelum dinaikkan kepada kepala Badan							Draf RAD	10 Menit	Dokumen	
18.	Kepala Badan memeriksa rencana aksi daerah Tim Terpadu Penangan Konflik sebelum dikirim kepada Bupati Kepulauan Anambas selaku Ketua Tim Terpadu Penangan Konflik Kab. Kep. Anambas							Dokumen	15 Menit	Dokumen	
19.	Bupati menerima laporan rencana aksi daerah Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten kepulauan Anambas untuk dapat ditandatangani sebelum dikirim ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Kepulauan Riau Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Kepulauan Riau							Dokumen	30 Menit	Dokumen	
20.	Laporan Rencana aksi Daerah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas telah siap untuk diarsipkan dan menjadi acuan bagi penanganan konflik Tim Terpadu							Arsip	15 Menit	Arsip	